

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Responsibilitas adalah sebagai memenuhi kewajiban atau manifestasi kepedulian dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan suatu tindakan. Menurut Dwiyanto tanggung jawab merupakan elemen krusial dalam pelayanan publik, karena hal tersebut menunjukkan kapasitas organisasi untuk memahami kebutuhan masyarakat, menyusun agenda serta memprioritaskan pelayanan, dan merancang program-program pelayanan publik yang selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat (Dwiyanto Agus, 2021).

Responsibilitas mengacu pada tindakan dalam pimpinan untuk mencapai tujuan atau bertanggung jawab atas seluruh kinerja bawahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan bertanggung jawab untuk memperbaiki suatu kerusakan yang timbul dalam suatu keputusan (Dwi S et al., 2020). Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi tanggung jawab atas mencapai suatu perubahan dalam proses atau program yang telah diterapkan.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mengembangkan sektor wisata tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, promosi, pengelolaan regulasi, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini sering kali tidak efektif, terlihat dari kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lokal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata.

Pariwisata adalah salah satu sektor utama dalam perekonomian nasional Indonesia, yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Namun, pengembangan pariwisata ditingkat lokal sering kali menghadapi tantangan struktural, seperti kurangnya infrastruktur, promosi yang minim, dan koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 pada pasal 1 menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai bentuk kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai macam Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah daerah maupun Pemerintah pusat.

Provinsi Aceh adalah salah satu dari beberapa provinsi di Indonesia yang memiliki keindahan alamnya yang sangat beragam. Meskipun saat ini belum begitu banyak dikenal oleh para wisatawan asing maupun lokal. Akan tetapi salah satu Provinsi Aceh yang memiliki beberapa objek wisata yang sangat menarik dan indah alamnya adalah Kabupaten Aceh Singkil.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Induk Pembangunan kepariwisataan Aceh Tahun 2022-2037 berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam mengatasi masalah ini. Qanun ini menetapkan visi pembangunan pariwisata aceh yang berkelanjutan, dengan fokus pada pengembangan destinasi wisata alam seperti waduk, yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pariwisata merupakan suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana dan prasarana, dan aspek-aspek lainnya. Setiap daerah memiliki wisata

unggulannya tersendiri dalam hal objek wisata. Begitu juga dengan kabupaten aceh singkil memiliki icon tersendiri dalam hal destinasi pariwisatanya (Fithra et al., 2022),

Pariwisata di Kabupaten Aceh singkil juga terdapat potensi wisata alam yang menarik seperti waduk Sianjo-Anjo yang terletak di Kecamatan Simpang Kanan. Waduk ini, yang dibangun sebagai bagian dari proyek irigasi dan penyediaan air, pengendalian banjir, pengembangan perikanan, memiliki keindahan alam berupa air jernih, pepohonan rindang, dan akses ke sungai-sungai kecil yang cocok untuk kegiatan wisata rekreasi, seperti memancing, berkemah, dan wisata edukasi lingkungan. Namun, beberapa tahun terakhir waduk ini juga dimanfaatkan sebagai ruang publik dan objek wisata lokal (Asyari, 2013).

Selain itu, terdapat Masalah utama yang dihadapi pengembangan waduk menjadi destinasi wisata menghadirkan berbagai tantangan seperti, keterbatasan pendanaan dan infrastruktur akses jalan, fasilitas sanitasi, yang kurang memadai, pengelolaan sampah yang tidak optimal, serta kurangnya program promosi dan pelatihan untuk pelaku usaha lokal untuk masyarakat. Sehingga kunjungan wisatawan ke waduk sianjo-anjo masih rendah, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar belum terasa secara signifikan, yang akhirnya memperburuk kondisi sosial ekonomi dikecamatan tersebut (Zannah, 2024).

Sejalan dengan proses pengembangan Waduk Sianjo-Anjo sebagai ruang publik dan destinasi wisata, penting untuk melakukan studi empiris mengenai bagaimana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya, yang meliputi perencanaan, pendanaan, koordinasi stakeholder, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengatasi defisiensi

data di tingkat lokal serta memberikan saran praktis untuk pengelolaan waduk wisata yang inklusif dan berkelanjutan (Kusumawardhani, 2024).



Gambar 1.1

Wisata Waduk Sianjo-Anjo (Tahun 2026)

Berdasarkan Gambar tersebut, terlihat kawasan waduk Sianjo-Anjo yang ditandai oleh hamparan perairan yang luas, dikelilingi oleh vegetasi hijau serta struktur bendungan yang masih alami. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi wisata alam yang cukup besar, baik dalam bentuk wisata panorama, ekowisata, maupun wisata berbasis konservasi. pemerintah daerah, keberadaan waduk dengan lingkungan yang relatif terjaga mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mempertahankan fungsi waduk tidak hanya sebagai sarana pengairan,. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merencanakan pemanfaatan kawasan waduk secara berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang, upaya perlindungan lingkungan, serta pengembangan wisata yang berwawasan lingkungan.

Waduk berfungsi untuk Penyediaan air, Pengendalian air pada musim hujan dan nantinya dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pada musim kemarau. Diantaranya adalah untuk kebutuhan air baku, air irigasi, pembangkit

energi dan beberapa kebutuhan air lainnya Oleh karena itu, ketersediaan air dapat berlebihan atau tidak mencukupi, sehingga diperlukan pedoman peraturan pelepasan air waduk untuk memenuhi kebutuhan air.

Dengan meningkatkan visibilitas ini, Waduk Sianjo-Anjo berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah dan mendukung kehidupan masyarakat lokal, jika pengelolaannya dilakukan secara efisien. Pengelolaan waduk yang efisien dapat memperkaya pilihan wisata di daerah tersebut, mendukung pengembangan usaha kecil, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (Nurul hayati, 2025). Namun, Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengubah pemanfaatan informal menjadi produk wisata yang bersifat adil, aman, dan berkelanjutan, sebagaimana didukung oleh hasil penelitian mengenai kontribusi pemerintah dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.



Gambar 1. 2
Jalan Waduk Sianjo-Anjo (Tahun 2024)

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat gerbang masuk kawasan wisata Bendungan/Waduk Sianjo-Anjo di Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil yang menunjukkan adanya pelaksanaan responsibilitas pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar pariwisata. Keberadaan gerbang permanen, papan nama, serta akses jalan beraspal mencerminkan upaya pemerintah daerah

dalam meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan memperkuat identitas Waduk Sianjo-Anjo sebagai destinasi wisata, sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. (Rusid Hidayat Berutu, 2019)

Tabel 1.1

Responsibilitas pemerintah Daerah Waduk Sianjo-Anjo

Aspek Responsibilitas	Program atau Kegiatan	Keterangan
Infrastruktur	Pembangunan akses jalan, parkir, penerangan, dan fasilitas umum.	Fasilitas pendukung Sianjo-anjo masih terbatas, sehingga kenyamanan dan daya tarik bagi wisatawan belum optimal.
Promosi dan Publikasi	Promosi melalui media sosial, event daerah, dan website pemerintah.	Promosi dilakukan secara lokal, belum menjangkau tingkat provinsi/nasional
Pengelolaan dan regulasi	Penetapan aturan pengelolaan wisata, tiket masuk, dan keterlibatan masyarakat lokal.	Perlu regulasi yang jelas agar pengelolaan tidak tumpang tindih
Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan umkm, kuliner lokal, penyediaan jasa wisata (pemandu, homestay).	Sebagian masyarakat sudah ikut, tapi masih kurang dukungan modal dan pelatihan.

Sumber: Waduk Sianjo-anjo data diolah 2025

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama berkaitan dengan pembangunan yang masih diarahkan untuk menyusun kebijakan dalam memenuhi sarana dan prasarana diwaduk sianjo-anjo. Sehingga sudah terjadinya infrasktruktur seperti, pembangunan akses jalan, parkir, penerangan, dan fasilitas umum dalam waduk sianjo-anjo juga terdapat tentang pemberdayaan masyarakat yang sebagian sudah ikut, tapi masih kurang dukungan modal dan pelatihan, tetapi hanya sebagian yang terlaksana dalam waduk sianjo-anjo tersebut.

Pengembangan Waduk Sianjo-Anjo menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata masih berorientasi pada ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor utama. Kondisi ini mencerminkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Waduk Sianjo-Anjo belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek nonfisik, seperti pengelolaan, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan. Sehingga, pembangunan pariwisata merupakan proses transformasi yang bertujuan menciptakan nilai tambah secara komprehensif dalam berbagai aspek pengembangan wisata waduk Sianjo-Anjo sebagai berikut.

Tabel 2.1
Pengembangan wisata waduk Sianjo-Anjo

Tahun	Fokus Kegiatan	Sumber Anggaran	Target
2023	Penataan awal kawasan waduk sianjo-anjo serta pembangunan infrastruktur pengairan dan pengendali air dan perbaikan akses jalan, penerangan.	APBD/Kabupaten Aceh Singkil	Meningkatkan aksesibilitas dan membuka potensi wisata
2024	Pembangunan sarana penunjang wisata seperti gerbang masuk, papan nama kawasan, serta penataan lingkungan sekitar waduk.	APBD	Memperkuat identitas waduk Sianjo-anjo sebagai destinasi wisata dan meningkatkan kenyamanan pengunjung
2025	Pegembangan fasilitas dasar dan perencanaan pengelolaan	APBD dan dukungan lintas sektor	Pengelolaan wisata berkelanjutan dan peningkatan kunjungan

Sumber :Data diolah peneliti 2025

Berdasarkan tabel, pengembangan wisata Waduk Sianjo-Anjo periode 2023–2025, terlihat bahwa responsibilitas pemerintah daerah dilaksanakan secara

bertahap sesuai dengan prioritas pembangunan. Pada tahun 2023, pengembangan difokuskan pada penataan awal kawasan dan perbaikan akses jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wisata. Tahun 2024 diarahkan pada pembangunan gerbang masuk dan penanda kawasan sebagai upaya memperkuat identitas destinasi dan kenyamanan pengunjung. Selanjutnya, pada tahun 2025, pengembangan difokuskan pada penyediaan fasilitas dasar dan perencanaan pengelolaan wisata berkelanjutan. Pola tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Pengembangan wisata Waduk Sianjo-Anjo menunjukkan adanya responsibilitas pemerintah daerah yang diwujudkan melalui penyusunan perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, serta penetapan sasaran pengembangan yang berorientasi pada keberlanjutan. Meskipun demikian, pelaksanaan pengembangan tersebut masih memerlukan penguatan melalui kebijakan yang lebih terintegrasi, pengelolaan yang profesional, serta peningkatan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan terkait agar potensi wisata waduk dapat dioptimalkan secara maksimal.

Berdasarkan data Kabupaten Aceh Singkil tahun 2022 sektor pariwisata hanya berkontribusi terhadap pendapatan daerah, dengan jumlah wisatawan domestik dan internasional yang berkunjung ke objek wisata alam di kecamatan simpang kanan kurang dari 5.000 orang setiap tahun, padahal potensi yang dimiliki sangat besar. Menurut data dalam penelitian ini dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Aceh singkil, waduk sianjo-anjo memiliki luas

permukaan sekitar 150 hektar dan berada di tengah ekosistem hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati, namun hanya beberapa persen saja dari kawasan tersebut yang telah dijadikan zona wisata. Dan juga ada fakta lain dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat lokal di kecamatan simpang kanan bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, dengan tingkat kemiskinan mencapai 8,5%, yang bisa dikurangi melalui pengembangan wisata berbasis masyarakat tersebut.

Dengan latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas menimbulkan minat dan keinginan peneliti untuk membahas dan menuangkan hasil penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Responsibilitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wisata Waduk Sianjo-anjo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil”**. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi penelitian mendatang dan bagi pengambil Keputusan dalam menyusun program-program pengembangan wisata yang lebih optimal.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Responsibilitas pemerintah daerah dalam pengembangan wisata Waduk Sianjo-Anjo di kabupaten Aceh Singkil?
2. Apa Hambatan Pemerintah daerah dalam Pengembangan wisata Waduk Sianjo-Anjo di kabupaten Aceh Singkil?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Responsibilitas Pemerintah daerah dalam Pengembangan Wisata Waduk Sianjo-Anjo yang difokuskan pada aspek kejelasan tanggung jawab dan

wewenang dalam kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana dan kebijakan pengelolaan keuangan.

2. Hambatan Pemerintah daerah dalam Pengembangan wisata Waduk Sianjo-Anjo di kabupaten Aceh Singkil.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis Responsibilitas Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wisata Waduk Sianjo-Anjo di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengidentifikasi Hambatan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Wisata Waduk Sianjo-Anjo di Kabupaten Aceh singkil.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur tentang otonomi daerah dalam pengelolaan potensi wisata alam, dengan fokus pada tantangan spesifik di wilayah Aceh singkil yang terkenal dengan sumber daya alamnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Aceh singkil dan Kecamatan simpang kanan untuk meningkatkan pengembangan wisata Waduk Sianjo-anjo. Dan dapat

mendorong pembentukan kebijakan yang lebih efektif, seperti alokasi anggaran untuk infrastruktur wisata, promosi, dan pelatihan masyarakat setempat.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat simpang kanan dan sekitarnya dengan meningkatkan kesadaran tentang potensi wisata Waduk Sianjo-anjo sebagai sumber pendapatan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengembangan wisata, seperti pelatihan keterampilan pariwisata atau pengelolaan usaha kecil bagi masyarakat setempat.